

ANALISIS GRAMSCI TERHADAP IDE PEMERINTAH MEKSIKO PADA GERAKAN ZAPATISTA (PERIODE 1994-2006)

Oleh

Kartika Giri Wijayanti

Abstract

This research discusses Antonio Gramsci's analysis of the idea of the Mexican Government for the period 1994-2006 that included three presidents, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo and Vicente Fox Quesada on the Zapatista movement. Zapatistas fought after the effectiveness of NAFTA on January 1, 1994, which makes society increasingly impoverished Chiapas. In response to the Zapatista movement, the Mexican government acts motivated by different ideas. The authors take the theory approach with the theory of Antonio Gramsci on hegemony and counter hegemony to analyze the idea that owned by each president.

Key Words : Gramsci, Hegemony, Counter Hegemony.

Pendahuluan

Pasca PD II, suasana perpolitikan dunia berubah. Kemenangan faham liberal membuat Amerika Serikat dan sekutunya mulai memperluas faham liberal keseluruh dunia terutama melakukan agen-agen implementasinya. NAFTA, merupakan salah satu agen implementasi neoliberalisme yang berupa perjanjian perdagangan bebas yang ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat George Bush, Perdana Menteri Kanada Brian Mulroney dan Presiden Meksiko Carlos Salinas pada tahun 1992. Perjanjian ini diklaim akan memasukkan Meksiko dalam kalangan “dunia pertama” (Gilbreth, 2001: 1).

Akan tetapi implementasinya, NAFTA kemudian membawa dampak dalam negeri yang cenderung merugikan bagi Meksiko. Hal ini bertentangan dengan janji yang diberikan oleh mantan presiden Meksiko, Carlos Salinas, bahwa NAFTA dengan perdagangan bebas dan investasi asing yang dibawanya akan menghasilkan perkembangan negara, mewujudkan Meksiko yang kaya dan lebih makmur (www.nytimes.com diakses pada 12 Mei 2013 pukul 16.25 WIB). Adanya perjanjian NAFTA ternyata membawa perubahan yang sangat signifikan bagi masalah pertanian, seperti kepemilikan tanah masyarakat pribumi dan subsidi pertanian menjadi sistem liberal. Pada 1992, Pemerintah Meksiko membuat amandemen terhadap pasal 27 Konstitusi Meksiko yang menjamin kepemilikan tanah pribumi yang disebut *ejido*, sebagai persiapan untuk masuk dalam perjanjian NAFTA. Amandemen membuat

perubahan dengan mengijinkan privatisasi pada *ejido* tersebut. Pemerintah Meksiko juga mulai menghentikan subsidi pertanian.

Chiapas, sebagai wilayah dengan penduduk dengan matapencaharian utama sebagai petani menjadi wilayah terdampak dari implementasi perjanjian ini. Chiapas sebenarnya merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam akan tetapi sangat kontras dengan masyarakatnya yang terbelakang dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Implementasi perjanjian NAFTA pada 1994 yang terutama berdampak pada masalah pertanian, membuat kondisi lokal Chiapas dan hubungan masyarakat dan pemerintah kian memburuk.

Peluncuran NAFTA untuk berlaku efektif pada 1 Januari 1994 dijadikan sebagai momentum perjuangan dan pernyataan deklarasi perang terhadap pemerintah oleh kelompok yang menamakan diri mereka sendiri sebagai *Zapatista Army for National Liberation* atau EZLN (*Ejército Zapatista de Liberación Nacional*) atau Zapatista, kelompok bersenjata yang beranggotakan masyarakat pribumi Indian Maya dan bermukim di Chiapas, Meksiko Selatan. Pernyataan perang ini tertuang dalam Deklarasi Pertama atau *First Declaration of Lacandona Jungle* pada 1 Januari 1994 oleh pemimpin Zapatista. Pernyataan ini juga didistribusikan keseluruh penduduk Meksiko lewat koran kecil yang bernama *El Despertador Mexicano* (*The Mexican Awakener*) (Ramírez, 2008: 105–106). Deklarasi ini berisi pokok perjuangan utama mereka yaitu: pekerjaan, tanah,

tempat tinggal, makanan, kesehatan, pendidikan, demokrasi, kebebasan, perdamaian, kemerdekaan dan keadilan (Ross, 2000: 20). Deklarasi ini juga menyiratkan tujuan Zapatista untuk mengalahkan tentara federal, menurunkan presiden dan membuat seluruh rakyat Meksiko dapat memilih pemimpin mereka sendiri secara bebas dan demokratis (Knasabhis, 2010: 5-6).

Keberadaan Zapatista yang mengancam *status quo* membuat Pemerintah Meksiko melakukan serangkaian tindakan yang berbeda sejak kemunculannya pada 1994 hingga berkurangnya intensitas pergolakan pada 2006, sebagai respon atas gerakan Zapatista. Pada saat kemunculan Zapatista pada 1 Januari 1994, Presiden Salinas yang berasal dari partai PRI merespon dengan menggunakan tindakan represif dengan menembak dan melakukan penyisiran pada rumah-rumah yang diduga menyembunyikan kelompok Zapatista. Salinas menganggap Zapatista sebagai tentara bayaran profesional dan kelompok asing yang merusak dan mengganggu masyarakat (Monsivais, 1999: 16).

Presiden Ernesto Zedillo yang meneruskan kepemimpinan partai PRI di Meksiko (Monsivais, 1998: 55) juga melakukan tindakan untuk mengatasi Zapatista. Sejak awal Zedillo terlihat menginginkan upaya represif untuk masalah Chiapas salah satunya dengan membubarkan gencatan senjata, kampanye *war on zapatista* dengan melakukan serangkaian serangan ke hutan Lacandon (Mentinis, 2006: 17). Zedillo juga menggunakan paramiliter yang berafiliasi dengan PRI untuk menyerang Zapatista salah satunya peristiwa penyerangan ke komunitas Acteal, *the Trotzil* yang dikenal dengan *Acteal Massacre*. Selain tindakan represif, Zedillo juga melakukan negosiasi yaitu *San Andres Accord* pada 1996 yang berisi tentang pemenuhan hak-hak dan kebudayaan penduduk pribumi meskipun pada akhirnya gagal dalam implementasinya.

Kepemimpinan Meksiko sekaligus kewajiban untuk mengatasi masalah Chiapas kemudian berpindah pada Vicente Fox Quesada, presiden terpilih dari partai PAN (Partai Aksi Nasional), yang sekaligus menandai berakhirnya 71 tahun hegemoni partai PRI. Vicente dalam kampanyenya telah berjanji dapat mengatasi permasalahan di Chiapas dalam waktu 15 menit (Mentinis,

2006: 25). Vicente membuktikannya dengan melakukan negosiasi damai dan berusaha mengakomodasi kepentingan Zapatista di kongres Meksiko.

Dari latar belakang masalah yang dijelaskan diatas peneliti merumuskan masalah ke dalam satu pertanyaan umum yaitu bagaimana Ide Pemerintah Meksiko terhadap Gerakan Zapatista dalam kerangka analisis Gramsci?

Menurut Gramsci, hegemoni adalah dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya, dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi diterima sebagai sesuatu yang wajar yang bersifat moral, intelektual serta budaya (Morton, 2007: 125). Kelompok sosial membuat dan menyebarkan ide-ide. Ide-ide ini saling “bertarung” di *civil society*, sehingga ide yang menang akan menjadi sebuah ide hegemonik sekaligus menempatkan pengusungnya menjadi kelompok sosial hegemon. Suatu ide akan menjadi hegemonik jika sudah menjadi *common sense* yang keberadaannya tidak perlu dipertanyakan lagi (*taken from granted*). Jika yang berkuasa adalah kelas borjuis maka ide-ide kelas borjuislah yang akan menjadi *common sense* (Gill, 1993: 56-57). Sebaliknya, ide yang diusung oleh kelompok sosial yang kalah dalam “pertarungan” akan termarginalisasi sekaligus menempatkan pengusungnya pada posisi marginal dalam sebuah negara.

Namun menurut Femia, Gramsci menilai hegemoni lebih merupakan kepemimpinan moral dan ideologi tanpa keikutsertaan praktek dominasi dan senjata (Femia, 1975: 23-24). Dominic Strinati yang juga meneliti teori Gramsci, juga menerangkan pentingnya konsensus dan persetujuan dari masyarakat untuk mempertahankan dominasi mereka sesuai dengan teori Gramsci (Strinati, 1995: 165).

Hegemoni tidak pernah dapat diperoleh begitu saja, tetapi harus diperjuangkan terus menerus. Untuk mempertahankannya, kelompok sosial hegemon akan terus berusaha mempertahankan kedudukannya (Simon, 2004: 45-46). Selanjutnya menurut Mansour Fakih, “Proses hegemoni terjadi apabila cara hidup, cara berpikir dan pandangan pemikiran masyarakat bawah terutama kaum

proletar telah meniru dan menerima cara berpikir dan gaya hidup dari kelompok elit yang mendominasi dan mengeksploitasi mereka” (Fakih, 2002: 145).

Pada suatu masa kelompok penguasa akan merasa lelah dan kehilangan dominasi mereka (*crisis hegemony*), di saat inilah subordinat mengambil peran (Gramsci, 1976: 210). Kelompok subordinat dalam situasi ini mulai menyadari dan merasa dirugikan oleh kelompok penguasa. Kesadaran ini disebabkan oleh munculnya intelektual organik yang memahami klas subordinat akan kondisi yang tidak adil (Patria dan Andi, 2009:155). Kesadaran ini pada akhirnya akan menyebarkan ancaman pada eksistensi klas penguasa karena mereka kehilangan konsensus atas masyarakat serta akan melahirkan sebuah tindakan *counter hegemony* yang tujuannya menggantikan ideologi yang dibawa kelas dominan dengan ideologinya sendiri (*Ideological struggle*). Kelompok penguasa yang kehilangan konsensus dikatakan Gramsci hanya akan mendominasi bukan memimpin (Gramsci, 1976: 25).

Dalam menjalankan *counter hegemony*, menurut Gramsci ada 2 strategi yang ditempuh yaitu *war of position* (perang posisi) dan *war of maneuver* (perang siasat). Perang posisi atau *war of position* adalah gerakan untuk mengepung aparatus negara dengan suatu *counter hegemony* yang diciptakan oleh organisasi massa kelas pekerja dengan membangun lembaga serta mengembangkan budaya proletar. Artinya, klas buruh tidak didorong untuk menggunakan serangan frontal kepada klas borjuis tetapi sebagai fondasi dari sebuah budaya, nilai dan norma baru dari masyarakat proletar (Patria dan Andi, 2009: 177-178). Sedangkan Perang Siasat atau *war of maneuver* adalah tindakan revolusioner yang secara cepat menggunakan kekerasan untuk menggulingkan pemimpin kapitalis yang juga mengandalkan kekerasan untuk menekan klas proletar dan mempertahankan *status quo* mereka. Cara ini merupakan lanjutan *war of position* yang sudah dilakukan secara matang terlebih dahulu (Bellamy, 1990: 201).

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* atau penelitian studi pustaka. Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah Ide Pemerintah Meksiko pada

Gerakan Zapatista periode 1994-2006 yang meliputi Presiden Salinas, Zedillo dan Fox. Peneliti menggunakan jenis data sekunder dan data yang diperoleh dari studi literatur yang dikumpulkan dari buku-buku serta hasil penelitian lainnya. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka secara manual yaitu melalui literatur buku cetak dan *on line*. Teknik analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data (Sutopo, 2006:113).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam penelitian ini Penulis menyimpulkan ada 4 ide utama yang berkonflik, secara ekonomi ada ide neoliberal dan sosialis, serta secara politis, ada ide otoriter dan ide demokratis. Salinas dan Zedillo mengusung ide neoliberal otoriter sedangkan Vicente Fox yang menjadi presiden selanjutnya mengusung ide neoliberal demokratis. Bila mencermati perbedaan ide tersebut, dapat terlihat terjadi pergeseran ide yaitu ide dibidang politis diantara presiden-presiden Meksiko pada periode 2000-2006. Pemerintahan Salinas dan Zedillo yang sebelumnya mengusung ide otoriter, berubah menjadi ber-ide demokratis dalam masa kepemimpinan presiden dari partai oposisi Partai Aksi Nasional (PAN), Vicente Fox. Salinas dan Zedillo merupakan agen dari sebuah partai yang telah berkuasa sangat lama, 71 tahun di Meksiko.

Ide otoriter muncul dari keberadaan PRI yang dianggap sebagai sebuah “warisan” dari revolusi Meksiko sehingga mereka dapat memerintah dengan satu sistem kepartaian tunggal dan otoriter. Adanya ide ini memperlancar ruang gerak pemerintah untuk mewujudkan ambisi membangun perekonomian Meksiko dengan ide mengenai neoliberalisme. Neoliberalisme sebagai tren ide global diadopsi oleh pemerintahan Meksiko dalam rangka mengintegrasikan perekonomiannya ke pasar dunia. Ide neoliberalisme otoriter kemudian masuk dan mewarnai kebijakan dan tindakan kedua presiden.

Dalam pandangan Gramsci, PRI, sebagai partai dari Salinas dan Zedillo berhasil memelihara idenya sebagai “warisan revolusi” dan sistem otoritarian karena masyarakat Meksiko menganggap kemenangan dan kepemimpinan PRI selama

71 tahun merupakan hal yang sudah sewajarnya. Ide otoriter ini telah menjadi ide yang hegemonik. Akan tetapi memasuki periode 1980-an, ide neoliberalisme muncul dan mulai diterapkan ke dalam kebijakan-kebijakan. Implementasi ide neoliberalisme kemudian menimbulkan reaksi pada masyarakat yang dirugikan atas kebijakan bernuansa neoliberal tersebut. Ide inilah yang justru kemudian membawa PRI masuk ke era krisis hegemoninya.

Bila menilik teori Gramsci, kemunculan Zapatista merupakan sebuah kondisi yang sudah dapat diprediksi. Pada suatu masa kelompok penguasa akan merasa lelah dan kehilangan hegeonitas mereka atau dinamakan krisis hegemoni, di saat inilah subordinat mengambil peran (Gramsci, 1976: 210). Sejak 1980-an, hegemoni PRI bisa dikatakan runtuh dan hanya menyisakan dominasi saja. Dominasi disini berarti memimpin dengan menggunakan kekerasan tanpa ada lagi kepemimpinan moral dan intelektual, kekerasan dalam hal ini antara lain dilakukan oleh aparat militer. Sedangkan hegemoni yang dimaksud Gramsci adalah yang cenderung pada penggunaan kepemimpinan moral dan intelektual sehingga menghasilkan persetujuan atau *consent* dari *civil society*. Langkah koersif merupakan pilihan terakhir dan menunjukkan kelemahan ideologis dan kultural. Krisis hegemoni juga ditandai dengan ketidakadaan kesadaran spontan.

Ide hegemonik yang berusaha di bawa PRI pada tahun 1988 di bawah kepemimpinan Salinas mengusung ekonomi neoliberal terbukti gagal diterima sebagai kepentingan bersama oleh seluruh penduduk Meksiko. Menurut Mansour Fakih, "Proses hegemoni terjadi apabila cara hidup, cara berpikir dan pandangan pemikiran masyarakat bawah terutama kaum proletar telah meniru dan menerima cara berpikir dan gaya hidup dari kelompok elit yang mendominasi dan mengeksploitasi mereka." (Fakih, 2002: 145). Ini yang hilang dari hegemoni PRI, masyarakat petani Chiapas yang tergabung dalam Zapatista, yang dalam hal ini dapat diposisikan sebagai kelompok proletar, telah disadarkan akan kondisi eksploitasi ini sehingga tidak lagi menerima kepemimpinan PRI sebagai *taken from granted* dan ide-idenya tidak menjadi *common sense* lagi.

Gagalnya ide hegemonik dari penguasa untuk diterima sebagai

kepentingan bersama membuat kelompok subordinat kemudian berusaha mengubah nilai-nilai dari *rulling class*, dalam kasus ini, PRI yang menguasai pemerintah Meksiko. Dalam memunculkan sebuah kelompok subordinat, dibutuhkan peran *organic intellectual* yang akan menyebarkan ide-ide *counter hegemony*. Para komandan Zapatista dan Marcos telah berhasil berperan sebagai *organic intellectual* dan sukses "mendidik" warga Chiapas untuk tahu keadaan mereka yang tertindas dan selanjutnya dapat memperjuangkan hak-hak dan membalikkan keadaan. Kesadaran ini disebabkan oleh munculnya intelektual organik yang memahami kelompok subordinat akan kondisi yang tidak adil (Patria dan Andi, 2009;155).

Untuk menandingi ide hegemonik PRI yang neoliberal otoriter, Zapatista menciptakan idenya sendiri yang berfungsi sebagai *counter hegemony*, akan tetapi untuk dapat memenangkan "perang" ini Zapatista tidak bisa hanya mengusung kepentingan Chiapas akan tetapi harus melibatkan kepentingan seluruh masyarakat Meksiko. Pada akhirnya Zapatista menjadikan isu demokrasi, keadilan dan HAM serta sosialisme atau pemerataan pendapatan sebagai agenda kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan pendapat Gramsci bahwa untuk menjadi hegemonik sebuah kelompok harus mengusung kepentingan semua kelompok bukan kelompoknya sendiri saja.

Selain memunculkan Zapatista sebagai kelompok subordinat, hegemoni PRI juga melahirkan *counter hegemony* dari partai-partai oposisi. Pada pemilu tahun 2000, partai PAN mampu muncul sebagai pemenang dan mengakhiri kepemimpinan PRI. Presiden Vicente Fox muncul sebagai sosok baru yang menawarkan ide-ide barunya sendiri yang berbeda dengan dua presiden sebelumnya yang berasal dari PRI, yaitu ide demokratisasi dan memandang Zapatista sebagai teman bicara. Fox sejak awal kampanyenya menjanjikan untuk mengatasi masalah dengan Zapatista dalam waktu 15 menit, mengusung penyelesaian masalah dengan jalan dialogis dengan mengesampingkan penggunaan alat-alat kekerasan dan militer.

Counter hegemony yang dilakukan oleh Zapatista lewat penggunaan media secara cerdas oleh pemimpin-pemimpinnya, tidak hanya berhasil mendidik warga Chiapas yang dirugikan secara ekonomis-

politis oleh ide neoliberalisme otoriter pemerintahan Salinas dan Zedillo akan tetapi juga seluruh warga Meksiko. Mereka akhirnya mengerti bahwa kepemimpinan PRI yang otoriter sehingga menimbulkan dampak korupsi sistemis, militeristik yang tidak lagi sesuai dengan Meksiko yang mereka inginkan.. Ide demokratis terlihat lewat dengan kesediaan Fox untuk membawa RUU yang berisi poin-poin penting dalam Perjanjian San Andres ke Kongres Parlemen Meksiko. Fox juga menawarkan diri untuk bisa bertemu secara langsung dengan Marcos untuk membahas masalah penarikan tentara dari wilayah Chiapas serta pembebasan bagi tahanan politik.

Adanya ide neoliberal pada masa kepemimpinan presiden Fox, membuat ide Zapatista mengenai sosialisme juga tidak mendapatkan dukungan dari *civil society*, seperti pada dua presiden sebelumnya. Dalam rangka mengintegrasikan ekonomi Meksiko ke pasar global dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi, kepentingan Zapatista mengenai tanah adat, hak-hak petani, serta pemanfaatan SDA yang terangkum dalam RUU yang dihasilkan dalam Perjanjian San Andres tidak bisa diakomodasi karena akan merugikan perekonomian Meksiko. Dengan demikian, Zapatista telah gagal melakukan *counter hegemony* terhadap ide neoliberal di Meksiko.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi ide demokratisasinya (politis), ide Fox terbentur oleh ide neoliberalisme (ekonomis) yang dibawanya. Akan tetapi, banyak pihak menilai, upaya Fox yang ingin menerapkan ide demokratik yang berbeda dari ide otoriter dua presiden sebelumnya, dengan menjadikan Zapatista sebagai “teman bicara”, penghindaran penggunaan kekerasan militeristik, serta penghormatan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM telah berhasil diraih. Oleh sebab itu, ide pemerintah Meksiko mengenai neoliberalisme telah mengalami pergeseran dari neoliberalisme otoriter yang diusung Salinas dan Zedillo ke neoliberalisme demokratis yang diusung Fox karena telah berhasil mengadopsi ide demokratis yang juga dimiliki Zapatista. Dalam hal ini, Zapatista berhasil melakukan tandem dengan Fox untuk melakukan *counter hegemony*

terhadap ide otoriter Presiden Salinas dan Zedillo.

Penutup

Presiden Salinas dan Zedillo yang berasal dari partai PRI yang merupakan kelompok hegemon sama-sama mengusung ide neoliberalisme otoriter. Ide ini kemudian mendapatkan *counter hegemony* dari Zapatista yang mengusung ide demokratis sosialis. Presiden Salinas dan Zedillo dalam mempertahankan ide hegemonik otoriter terlihat ketika mereka mulai melakukan tindakan represif yang mengisyaratkan krisis hegemoni, sehingga hanya menyisakan dominasi saja, untuk mengembalikan ketertundukan spontan gerakan Zapatista.

Vicente Fox berhasil mengakomodasi ide demokratis dari Zapatista dan menjadikannya sebagai ide hegemonik baru. Akan tetapi Zapatista tidak berhasil melakukan *counter hegemony* terhadap ide neoliberalisme. Sehingga pada masa kepemimpinan Fox, ide neoliberalisme masih mewarnai pemerintahannya. Ide hegemonik Pemerintah Meksiko kemudian bergeser dari neoliberalisme otoriter ke neoliberalisme demokratis dalam masa pemerintahan Presiden Fox. Oleh Gramsci, Fox yang mengakomodasi ide demokratis tuntutan Zapatista, dianggap sudah melakukan tindakan yang tepat sebagai sebuah *ruling class* baru untuk mengusung kepentingan kelompok lain.

Daftar Pustaka

- Bellamy, Richard.1987. *Modern Italian Social Theory:From Pareto to the Present* terjemahan Vedi R. Hadiz, *Teori Sosial Modern:Perspektif Itali*.1990. Jakarta : LP3S.
- Fakih, Mansour.2002. *Jalan Lain Manifesto Intelektual Organik*. Yogyakarta: INSIST Press dan Pustaka Pelajar.
- Femia, J. V. 1975. *Hegemony and Consciousness in the Thought of Antonio Gramsci*, Political Studies, Vol. 23.
- Gilbreth, Chris dan Gerardo Otero. 2001. *The Zapatista Uprising dan Civil Society*. Ualberta. Latin American Perspectives Vol. 28 No. 4 Juli 2001. Sage Publication.
- Gill.1993.*Gramsci, Historical Materialism and International Relations*.

- Cambridge: Cambridge University Press.
- Gramsci, Antonio.1976. *Selections from Prison Notebooks*.Q. Hoare dan Nowell Smith (ed) New York: International Publisher.
- Knasnabhis, Alex.2010. *Zapatistas: Rebellion from the Grassroots to the Global* Zed Books Ltd, New York.
- Mentinis, Mihalis.2006. *Zapatistas, The Chiapas Revolt and What It Means For Radical Politics*. London: Pluto Press.
- Monsivais, Carlos.1998. *Mexico's Cultural Landscapes: A Conversation with Carlos Monsiváis.*" In *Rethinking History and the Nation State: Mexico and the United States*. Journal of American History 86:61322.
- Monsivais, Carlos. 1999. *Proceso: Semanario de información y análisis*. Special edition, 1 January 1991.
- Morton, Adam D. 2007. *Unravelling Gramsci. Hegemony and Passive Revolution in the Global Political Economy*. London: Pluto Press.
- Patria, Nazer dan Andi Arief. 2009. *Antonio Gramsci:Negara dan Hegemoni*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ramirez, Munoz G.2008. *The Fire and The Word: A History of Zapatista Movement*. San Fransisco: City Lights Publishers.
- Ross, J. 2000 *The War against Oblivion: The Zapatista Chronicles*. Monroe, Maine :Common Courage Press.
- Simon, Roger. 2004. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Diterjemahkan oleh Kamdani dan Imam Baehaqi: Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Strinati, Dominic. 2004. *An Introduction to Theories of Popular Culture*. New York: Routledge.
- Sutopo, H.B.2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Penerapannya dalam Penelitian*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- <http://www.nytimes.com/2009/03/24/business/worldbusiness/24peso.html?pagewanted=all>
1 diakses pada 12 Mei 2013 pukul 16.25 WIB